

**KEBIJAKAN MILITER JENDERAL TNI L.B. MOERDANI  
SEBAGAI PANGLIMA ABRI 1983-1988**

Peneliti 1 : Yudhi Irawan

Peneliti 2 : Zulkarnain, M.Pd.

[mr.yudhiirawan@yahoo.com](mailto:mr.yudhiirawan@yahoo.com)

**Abstrak**

Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah pemegang komando angkatan bersenjata (TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL dan Polri) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada tahun 1983, Presiden Soeharto mengangkat Letnan Jenderal TNI L.B. Moerdani sebagai Panglima ABRI. Selama kepemimpinan Jenderal TNI L.B. Moerdani berbagai kebijakan tentang penghematan, perampingan organisasi dan peningkatan profesionalisme prajurit mampu dilakukan sehingga ABRI tampil sebagai alat pertahanan negara yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) memahami proses pengangkatan Letnan Jenderal TNI L.B. Moerdani sebagai Panglima ABRI, (2) menganalisa kebijakan militer Jenderal TNI L.B. Moerdani sebagai Panglima ABRI, (3) mengetahui dampak kebijakan militer Jenderal TNI L.B. Moerdani sebagai Panglima ABRI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah Kuntowijoyo yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap *pertama* adalah menentukan topik penelitian, tahap *kedua* adalah heuristik atau pengumpulan sumber, tahap *ketiga* adalah verifikasi atau kritik sumber, tahap *keempat* adalah interpretasi yaitu proses menafsirkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan dan tahap *kelima* adalah historiografi atau penulisan sejarah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik dan pendekatan militer.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 47/M mengangkat Letnan Jenderal TNI L.B. Moerdani sebagai Panglima ABRI, (2) Program kebijakan militer Panglima ABRI Jenderal TNI L.B. Moerdani tentang perampingan organisasi ABRI dinilai berhasil dan mampu menghemat pengeluaran ABRI dan tetap mampu meningkatkan profesionalisme prajurit, (3) Di bawah komando TNI L.B. Moerdani, ABRI mampu membina kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan di kawasan ASEAN dan sekitarnya.

Kata Kunci: Jenderal TNI L.B. Moerdani, Panglima ABRI, 1983-1988

## **MILITARY POLICIES OF INDONESIAN ARMY GENERAL L.B. MOERDANI AS COMMANDER OF AFRI 1983-1988**

### **Abstract**

The Commander of Armed Forces of Republic of Indonesia (AFRI) is the holder of commands in armed forces (Indonesian Army, Indonesian Air Force, Indonesian Navy, and Indonesian Police Force) and is directly responsible to the president. In 1983, President Soeharto appointed Indonesian Army Lieutenant General L.B. Moerdani as Commander of AFRI. Under the leadership of General L.B. Moerdani, a variety of policies on saving, organization streamlining, and soldier's professionalism improvement were enforced so that AFRI appeared as a strong state defence institution. This study aimed to: (1) investigate the process of the appointment of Indonesian Army Lieutenant General L.B. Moerdani as Commander of AFRI, (2) analyze the military policies of Indonesian Army General L.B. Moerdani as Commander of AFRI, and (3) investigate the impact of the military policies of Indonesian Army General L.B. Moerdani as Commander of AFRI.

This study employed Kuntowijoyo's historical research method consisting of several stages. The first stage was topic selection, the second was heuristics or source collection, the third was verification or source criticism, the fourth was interpretation, namely the process of interpreting historical facts found, and the fifth was historiography or history writing. The research approaches in this study were the political and military approaches.

The results of the study were as follows. (1) The President's Decree No. 47 appointed Indonesian Army Lieutenant General L.B. Moerdani as Commander of AFRI. (2) The programs of military policies of the Commander of AFRI, Indonesian Army General L.B. Moerdani, on AFRI organization streamlining were considered successful and capable of saving AFRI expenses and still capable of improving soldiers' professionalism. (3) Under the command of Indonesian Army General L.B. Moerdani, AFRI was capable of establishing cooperation in the field of defence and security in the ASEAN region and the surroundings.

**Keywords:** *Indonesian Army General L.B. Moerdani, Commander of AFRI, 1983-1988*

## I. Pendahuluan

Untuk mencengkeram kekuasaan, Presiden Soeharto memiliki teman dan anak buah dalam prinsip pola hubungan yang berpegang pada loyalitas atau kesetiaan. Seperti pertemanan antara Soeharto, Basuki Rahmat, M. Jusuf dan Amir Machmud yang berperan dalam membidani Orde Baru era 1966-1970an dengan lawan perwira loyalis Nasution dan perwira loyalis Soekarno. Pertemanan politik dalam pola hubungan atasan dan bawahan terjalin yang terdiri atas Soeharto, Ali Moertopo dan Soemitro di tahun 1970an dengan lawan utama kalangan Islam politik dan nasionalis radikal. Pertemanan politik juga berlanjut dengan pola hubungan anak kepada bapak yaitu Soeharto, Leonardus Benjamin Moerdani dan Sudomo di era 1980an untuk membangun asas keseimbangan politik antara elite militer agamis dengan elite militer nasionalis.<sup>1</sup>

Pasca peristiwa 15 Januari 1974 (Malari), peran Mayor Jenderal TNI Ali Moertopo mulai meredup dan kemudian menyarankan nama Brigadir Jenderal TNI Benny Moerdani kepada Presiden Soeharto untuk menangani intelijen. Mayor Jenderal TNI Ali Moertopo menghubungi Brigadir Jenderal TNI Benny Moerdani yang berada di Korea Selatan agar segera pulang. Sepuluh hari setelah Peristiwa Malari, jabatan Komandan Satuan Tugas Intel Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Sat Intel Kopkamtib) serta Asisten Intelijen Pertahanan dan Keamanan diserahkan kepada Brigadir Jenderal TNI Benny Moerdani menggantikan Mayor Jenderal Kharis Suhud.<sup>2</sup>

Naiknya peranan Letnan Jenderal TNI Benny Moerdani pada tahun 1980an karena Presiden Soeharto memerlukan aliansi baru setelah pudarnya Letnan Jenderal TNI Ali Moertopo akibat serangan jantung tahun 1978 dan meninggal dunia pada tahun 1984 serta semakin surutnya pengaruh Sudjono Humardani setelah masuknya birokrat profesional. Sejalan dengan hal itu, Presiden Soeharto mulai mencari-cari gaya kepemimpinan militer yang baru. Sosok tersebut akhirnya bisa dia temukan dalam diri Letnan Jenderal TNI Benny Moerdani.<sup>3</sup>

### A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang akan menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.<sup>4</sup> Hal ini

---

<sup>1</sup> Susanto Zuhdi (Ed.), *Indonesia dalam Arus Sejarah 8: Orde Baru dan Reformasi*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 37.

<sup>2</sup> Tempo, *Rahasia-rahasia Ali Moertopo*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, hlm. 111-112.

<sup>3</sup> Julius Pour, *Benny: Tragedi Seorang Loyalis*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007, hlm. 341-342.

<sup>4</sup> Tim. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY, 2013, hlm. 3.

dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh data-data atau informasi yang lengkap mengenai permasalahan yang akan dikaji. Adapun literatur yang digunakan penulis sebagai bahan kajian pustaka adalah sebagai berikut.

Proses pengangkatan Letnan Jenderal TNI Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI berdasar kepada Surat Keputusan Presiden No 47/M tertanggal 16 Maret yang menyebutkan bahwa Letnan Jenderal TNI L.B. Moerdani dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata.<sup>5</sup> Sebagian orang menunjuk kendala dalam perjalanan karier kemiliteran Letnan Jenderal TNI Benny Moerdani yang belum memiliki pengalaman bidang teritorial.<sup>6</sup> Masalah ini dijelaskan dalam buku yang berjudul *Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan* karya Julius Pour. Kemudian Letnan Jenderal TNI Benny Moerdani diangkat menjadi Panglima ABRI pada 1983, melampaui para seniornya sehingga timbul kecemburuan yang datang dari para perwira tinggi atasan Benny Moerdani yang tidak terpilih menjadi Panglima ABRI.<sup>7</sup> Masalah ini dijelaskan dalam buku *Konflik dan Integrasi TNI-AD* karya Kivlan Zen.

Berbagai permasalahan yang dihadapi ABRI misalnya permasalahan dalam bidang teritorial terdapat pada buku *Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan* karya Julius Pour. Dan berbagai kebijakan militer Benny Moerdani untuk menata ABRI tertulis dalam buku *Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Pandangan dan Ucapan Jenderal TNI (Purn) L.B. Moerdani 1988-1991* karya L.B. Moerdani.

Dampak akibat kebijakan militer yang dilakukan oleh Jenderal TNI Benny Moerdani tertulis dalam buku yang berjudul *Benny: Tragedi Seorang Loyalis* karya Julius Pour dan *Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Pandangan dan Ucapan Jenderal TNI (Purn) L.B. Moerdani 1988-1991* karya L.B. Moerdani.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian sejarah pada dasarnya terikat pada prosedur metode sejarah. Metode sejarah sendiri merupakan aturan serta prinsip yang sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif dan menilai secara kritis yang dibuat dalam bentuk tulisan. Adapun tahap penelitian sejarah ada lima tahap yaitu: (1) pemilihan topik, (2) heuristik, (3) verifikasi (kritik sumber, keabsahan sumber), (4) interpretasi (analisis dan sintesis), dan (5) penulisan.<sup>8</sup>

### **a. Pemilihan Topik**

---

<sup>5</sup> Julius Pour, *Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan*. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, 1993, hlm. 453.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 461.

<sup>7</sup> Kivlan, *op.cit.*, hlm. 68.

<sup>8</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka. 2003, hlm. 90.

Tahap awal dalam melakukan penelitian adalah menentukan topik. Penentuan topik menjadi penentu dalam langkah berikutnya agar peneliti fokus dalam mencari sumber. Topik dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Menentukan topik bukanlah sesuatu yang mudah, peneliti harus memastikan bahwa topik yang akan diambil sudah dibahas oleh peneliti lain atau belum, adanya sumber data yang cukup, serta kesesuaian tentang disiplin ilmu yang peneliti tekuni.

b. Heuristik

Heuristik merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Berdasarkan bahannya, sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis (dokumen) seperti surat, catatan, dan notulen rapat, sedangkan sumber tidak tertulis (artifact) berupa foto-foto, bangunan, dan alat-alat.

Sumber sejarah menurut sifatnya dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari pelaku sejarah atau kesaksian secara langsung oleh seseorang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sedangkan sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata, yakni seorang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkannya.

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah keterangan dari sumber-sumber yang diperoleh dari pelaku yang menyaksikan atau ikut dalam suatu peristiwa sejarah. Laporan berupa tulisan yang berasal dari pelaku atau sumber sejalan dengan peristiwa yang dikisahkan juga termasuk dalam sumber primer.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pour, Julius. (1993). *Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan*. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman.

Pour, Julius. (2007). *Benny: Tragedi Seorang Loyalis*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

Moerdani, L.B. (1992). *Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Pandangan dan Ucapan Jenderal TNI (Purn) L.B. Moerdani 1988-1991*. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah kesaksian seseorang yang bukan merupakan saksi pandang mata yakni seseorang yang tidak hadir pada waktu berlangsungnya peristiwa tersebut.<sup>9</sup> Sumber sekunder berasal dari sumber buku yang keterangannya didapat dari pihak kedua yang diperoleh dari sumber primer. Sumber sekunder tidak sejaman dengan peristiwa dan diperoleh dari seseorang yang tidak terlibat atau langsung hadir baik melalui buku-buku, jurnal maupun majalah yang berkaitan.

Sumber sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tempo. (2015). *Benny Moerdani yang Belum Terungkap*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

### c. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik sumber adalah metode untuk menilai sumber-sumber yang dibutuhkan guna mengadakan penulisan sejarah.<sup>10</sup> Kegiatan ini adalah meneliti sumber untuk menentukan validitas dan kredibilitas pada sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Verifikasi ada dua macam yaitu autentisitas, atau keaslian, atau kritik ekstern, dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercaya, atau kritik intern.<sup>11</sup>

#### 1. Kritik Ekstern

Kritik ekstern adalah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan data catatan atau peninggalan informasi. Penelitian dan pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui apakah sumber telah diubah oleh orang-orang tertentu atau belum. Kritik ekstern harus menegakkan fakta dari kesaksian bahwa kesaksiannya benar-benar diberikan pada seseorang tersebut atau pada waktu peristiwa sedang terjadi. Kesaksian yang diberikan itu telah bertahan tanpa adanya perubahan, artinya bahwa kesaksian tidak ditambah-tambah atau dilakukan penghilang informasi yang substansial.<sup>12</sup>

#### 2. Kritik Intern

---

<sup>9</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Pengembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982, hlm. 35.

<sup>10</sup> Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1978, hlm 35.

<sup>11</sup> Kuntowijoyo, *loc.cit.*

<sup>12</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm 134.

Kritik intern berdasarkan istilahnya menekankan kepada aspek “dalam”, yaitu isi dari sumber kesaksian (testimoni). Setelah fakta kesaksian diterapkan melalui kritik eksternal, sejarawan kemudian melakukan evaluasi terhadap kesaksian tersebut. Sejarawan harus bisa menentukan kesaksian yang dapat dipercaya atau berupa opini.

d. Penafsiran (Interpretasi)

Penafsiran atau interpretasi merupakan kegiatan menafsirkan terhadap sumber-sumber yang ada dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu rangkaian peristiwa. Interpretasi disebut juga dengan analisis sejarah. Interpretasi dilakukan untuk mengurangi subyektifitas dalam kajian sejarah. Dalam tahap ini penulis dituntut untuk mencermati dan mengungkapkan data-data yang diperoleh.<sup>13</sup>

e. Penulisan (Historiografi)

Secara harfiah “historiografi” berarti pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu yang disebut sejarah. Rekonstruksi rekaman dan peninggalan masa lampau secara kritis dan imajinatif berdasarkan bukti-bukti atau data-data yang diperoleh melalui proses. Istilah historiografi kadang-kadang dipergunakan dalam arti pengkajian secara kritis buku sejarah yang telah ditulis, baik bersifat tradisional maupun modern.<sup>14</sup>

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi untuk memperkuat makna peristiwa masa lampau guna mendeteksi suatu peristiwa dalam berbagai aspek di kehidupan. Suatu peristiwa dalam berbagai sebab ini akan saling mempengaruhi sehingga beberapa pendekatan diharapkan mampu mengkaji penelitian secara mendalam. Adapun nilai strategis dari pendekatan ini adalah daya penerangannya untuk mengatasi pendekatan yang berakar pada filsafat tertentu yang menimbulkan determinasi.<sup>15</sup> Dalam penulisan ini peneliti menggunakan pendekatan politik dan pendekatan militer.

---

<sup>13</sup> I Gde Widja, *Sejarah Lokal dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, hlm. 18.

<sup>14</sup> Helius Sjamsuddin, *Pengantar Ilmu Sosial Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, hlm. 60.

<sup>15</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 87.

Politik adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Politik dalam bernegara selalu berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi.<sup>16</sup> Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik mengandung konsep-konsep tentang tata negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pembagian dari sumber-sumber yang ada. Pendekatan Politik diperlukan untuk memahami kekuasaan, sebagaimana kekuasaan digunakan, diperlukan dan keputusan-keputusan manusia untuk menjalankan kekuasaan itu sendiri. Dalam penelitian ini, tinjauan politik digunakan untuk menjelaskan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI oleh Presiden Soeharto yang menurut beberapa pengamat berdasar pendidikan dan jabatan teritorial yang pernah dijalani dinilai belum lengkap untuk menempati jabatan tersebut dan sarat akan kepentingan politik.

Pendekatan Militer, sangat penting digunakan untuk memahami adanya sekelompok orang yang terorganisir dengan pelatihan dan disiplin militer dengan tujuan pokok untuk mempertahankan kekuasaan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pola militer di Indonesia pada waktu itu, baik struktur, pejabat, maupun kebijakannya. Pendekatan Militer digunakan untuk menjelaskan kebijakan yang dilakukan Panglima ABRI Jenderal TNI Benny Moerdani.

## **I. Proses Pengangkatan Letnan Jenderal TNI L.B. Moerdani Menjadi Panglima ABRI 1983-1988**

### **A. Memenuhi Syarat Menjadi Panglima ABRI**

Sepanjang karirnya, Letnan Jenderal TNI Benny Moerdani belum pernah memegang jabatan teritorial seperti Komandan Resor Militer (Korem), Panglima Daerah Militer (Pangdam), bahkan KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) jenjang normal dalam struktur kepemimpinan ABRI.<sup>17</sup> Sehingga ada anggapan seakan-akan Letnan Jenderal TNI Benny Moerdani langsung meloncat dari jabatan intelijen ke posisi Panglima ABRI. Letnan Jenderal TNI Benny Moerdani merupakan ahli intelijen lulusan Chandradimuka tahun 1950 dan belum pernah menempuh pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).<sup>18</sup> Hal ini mengubah tradisi dimana seorang

---

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka. 2008, hlm. 8.

<sup>17</sup> Julius, *op.cit*, hlm. 461.

<sup>18</sup> Kivlan, *op.cit.*, hlm. 67.

intelijen menjadi pimpinan ABRI dan merupakan pengakuan tentang adanya dominasi intelijen dalam rencana politik Orde Baru.<sup>19</sup>

Banyak pengamat yang memandang sinis tentang pengangkatan Letnan Jenderal TNI Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI. Mereka berpendapat bahwa Letnan Jenderal TNI Benny Moerdani mampu menempati jabatan tersebut karena loyalitasnya yang tinggi sehingga mampu menjadi orang yang selalu berada di lingkaran dalam Presiden Soeharto.

Namun dengan pangkat terakhir sebagai Letnan Jenderal dengan usia 50 tahun, Benny Moerdani menjadi calon yang memenuhi syarat untuk melanjutkan kepemimpinan ABRI saat itu. Dengan usia 50 tahun, berarti Benny Moerdani merupakan salah satu dari sedikit perwira tinggi dengan tiga bintang yang masih memiliki kesempatan memenuhi ketentuan masa bakti selama lima tahun kedepan, mengingat batas usia pensiun adalah 55 tahun. Meski tidak ada peraturan secara tertulis, sudah jelas lebih baik jika masa jabatan seseorang tidak terputuskan dengan datangnya masa pensiun.<sup>20</sup>

#### **B. Proses Pengangkatan Letnan Jenderal TNI L.B. Moerdani Menjadi Panglima ABRI**

Hari Rabu tanggal 23 Maret 1983 Kepala Negara melantik Letnan Jenderal TNI Benny Moerdani, tentara dengan nomer pokok 289461 sebagai Panglima ABRI bertempat di Istana Merdeka. Pelantikan sesuai dengan Surat Keputusan Presiden No 47/M tertanggal 16 Maret 1983 yang menyebutkan bahwa Letnan Jenderal TNI L.B. Moerdani dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata.<sup>21</sup>

Setelah upacara pelantikan sebagai Panglima ABRI dan acara pengambilan sumpah selesai, Presiden Soeharto kemudian menaikkan pangkat Letnan Jenderal TNI Benny Moerdani satu pangkat lebih tinggi. Dari Letnan Jenderal bintang tiga ditetapkan menjadi Jenderal penuh berbintang empat. Bahkan Presiden Soeharto memasangkan sendiri empat bintang di kedua pundaknya sebagai tanda adanya kedekatan diantara mereka. Kenaikan pangkat Jenderal penuh sesuai dengan keputusan Presiden No. 24/ABRI, terhitung mulai tanggal 23 Maret 1983.<sup>22</sup>

Pelantikan Jenderal TNI Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI mengacu pada diberlakukannya UU No 20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik

---

<sup>19</sup> Susanto, *op.cit.*, hlm. 40.

<sup>20</sup> Kompas, 18 Maret 1983, hlm. I.

<sup>21</sup> Kompas, 24 Maret 1983, hlm. I.

<sup>22</sup> Julius, *op.cit.*, hlm. 457

Indonesia yaitu pemisahan jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Panglima ABRI. Pemisahan ini mengakibatkan Departemen Pertahanan dan Keamanan hanya mengurus bidang administrasi saja.<sup>23</sup>

## **II. Kebijakan Militer Jenderal TNI L.B. Moerdani sebagai Panglima ABRI 1983-1988**

### **A. Permasalahan yang Dihadapi ABRI**

Jenderal TNI Benny Moerdani memulai masa tugasnya sebagai Panglima ABRI dengan suasana perekonomian di Indonesia yang sedang lesu. Kemampuan pemerintah untuk mendukung pengembangan ABRI sangat terbatas hanya tersisa 40% yang bisa dialokasikan untuk pemeliharaan peralatan, biaya pendidikan, latihan dan pelaksanaan operasi.<sup>24</sup> Untuk jumlah personil ABRI saat itu berada pada sekitar 450.000. Tingkat kekuatan ini tidak lebih dari 0,25% jumlah penduduk. Sementara itu di berbagai negara tetangga Indonesia, tingkat kekuatan tentara mereka diatas angka 1%.<sup>25</sup>

Dalam masalah teritorial, wilayah cakupan Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) dinilai terlalu luas. Juga masalah tentang TNI-AU, TNI-AL dan Polri yang ikut menangani masalah teritorial.<sup>26</sup> Dalam bidang pendidikan militer lanjutan, sudah terlampau lama tidak diselenggarakan secara gabungan. Demikian pula pembenahan juga perlu dilakukan dalam penyusunan kurikulum pendidikan Akabri (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) karena seharusnya alokasi pendidikan ilmu kemiliteran harus lebih besar dari ilmu non militer.<sup>27</sup>

Dalam hal kedisiplinan, karena kurangnya dukungan pemerintah terhadap anggaran dan kesejahteraan prajurit, banyak institusi ABRI baik markas ataupun kesatuan melakukan bisnis ilegal dengan memanfaatkan senjata, kekuatan dan kekuasaan yang mereka miliki.

Gagasan tentang adanya perwira tinggi bintang empat aktif hanya ada satu yaitu Panglima ABRI dan Kepala Staf cukup dengan bintang tiga juga bagus untuk diterapkan guna mendukung perwujudan ABRI yang profesional, karena jabatan tidak selalu disediakan untuk pangkat. Serta untuk membatasi kemungkinan adanya anggota ABRI yang bisa naik pangkat namun tidak pernah

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 458.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 464.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 470-471.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 474-475.

menjalankan tugas militer.<sup>28</sup> Selain itu, rangkap jabatan yang dilakukan perwira tinggi senior dapat menimbulkan resiko tumpang tindih penanganan tugas serta kekaburan tanggung jawab.<sup>29</sup>

Dengan keadaan tahun 1980an, Doktrin Cadek 1966 perlu diadakan revisi mengingat perkembangan militer telah berubah dan keempat angkatan sudah terintegrasi secara baik dalam ABRI.<sup>30</sup> Sebagai wujud pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI dan mengemban tugas kemasyarakatan, ABRI, F-ABRI dituntut untuk mengangkat perwira yang lebih berbobot guna peningkatan kualitas F-ABRI dan dituntut untuk lebih lantang sebagai representasi bahwa ABRI adalah milik semua golongan.<sup>31</sup>

Terkait Kopassandha dengan jumlah 6.644 personil dinilai terlalu besar dan terlalu boros anggaran. Kebijakan tentang pengurangan personil Baret Merah ini agar dijadikan seleksi dan bisa diperoleh suatu pasukan komando yang kecil namun sangat efektif dalam mengemban setiap penugasan.<sup>32</sup>

#### **B. Kebijakan Militer Panglima ABRI Jenderal TNI L.B. Moerdani**

Setelah mengkaji beragam permasalahan yang dihadapi oleh ABRI, Jenderal TNI Benny Moerdani segera menyiapkan berbagai langkah kebijakan untuk melakukan penataan dalam tubuh ABRI. Penataan ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ABRI agar siap menghadapi perkembangan lingkungan dan kecenderungannya dimasa mendatang.

Dalam kajian yang dilakukan Panglima ABRI, terdapat tiga komponen utama postur ABRI yang harus ditinjau, yaitu struktur kemampuan, tingkat kekuatan dan gelar kekuatan. Kemudian sesuai dengan perintah harian pertama tanggal 1 April 1983 berisi tentang perintah penghematan, peningkatan efisiensi serta profesionalisme ABRI, langkah penghematan segera diterapkan dengan mengacu pada keterbatasan kemampuan negara dalam bidang anggaran sehingga harus pandai dalam mengelola dan memilih prioritas.<sup>33</sup>

Panglima ABRI Jenderal TNI Benny Moerdani juga semakin menekankan peranan ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator dalam tata kehidupan bermasyarakat. Angkatan Bersenjata

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 487.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 374.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 480-481.

<sup>31</sup> Susanto, *op.cit.*, hlm. 34-35.

<sup>32</sup> Julius, *op.cit.*, hlm. 479-480

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 473-474.

Republik Indonesia dalam perannya sebagai dinamisator mempunyai arti bahwa ABRI harus menjaga agar transformasi sosial tetap berjalan di dalam batas-batas nilai luhur bangsa sebagaimana tersirat maupun tersurat dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945. Sedang peranan ABRI sebagai stabilisator mempunyai arti bahwa ABRI harus mampu menjaga agar transformasi sosial yang berlangsung tetap di dalam batas-batas ambang toleransi intelijen.<sup>34</sup>

Beban tugas ABRI bukan saja hanya dalam membina stabilitas dalam negeri, akan tetapi juga wajib melakukan pembinaan kerjasama luar negeri guna mewujudkan sabuk stabilitas berlapis (*stability in depth*) yang menunjang bagi stabilitas dalam negeri. Dalam konsep ini ASEAN menjadi Sabuk Stabilitas Utama karena adanya kedekatan geografis dengan Indonesia. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara di luar ASEAN yaitu kawasan Pasifik Barat Daya (khususnya Papua New Guinea) dan Australia diberi nama Sabuk Stabilitas Penyangga Dalam, yaitu satu lingkungan kawasan yang dapat memberikan dampak (baik dampak positif maupun dampak negatif) kepada keadaan stabilitas di dalam negeri serta keadaan stabilitas ASEAN. Untuk negara-negara di kawasan Asia Barat dan Samudera Hindia di sebelah barat serta kawasan Pasifik di sisi timur seperti India, Republik Rakyat Cina, Jepang dan ketiga negara *New Industrialized Countries* (NIC) diberi nama Sabuk Penyangga Stabilitas Luar.<sup>35</sup>

### **III. Dampak Kebijakan Militer Jenderal TNI L.B. Moerdani sebagai Panglima ABRI 1983-1988**

#### **A. Dampak Kebijakan Militer Panglima Jenderal TNI L.B. Moerdani**

Setelah dilakukan tinjauan dan penataan terhadap tiga komponen utama postur ABRI yaitu struktur kemampuan, tingkat kekuatan dan gelar kekuatan, kini Panglima ABRI dapat menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan negara dengan langsung membawahi seluruh Komando Utama pada masing-masing angkatan. Pada TNI-AD, Kotama terdiri dari seluruh Kodam, Kostrad, serta Komando Pasukan Khusus. Kemudian pada TNI-AL terdapat dua Kotama, Armada dan Korps Marinir. Pada TNI-AU, terdiri atas Koops dan Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> L.B. Moerdani, *Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Pandangan dan Ucapan Jenderal TNI (Purn) L.B. Moerdani 1988-1991*. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Panglima Besar Sudirman, 1991, hlm. 21-22.

<sup>35</sup> Moerdani, *op.cit*, hlm. 25-28.

<sup>36</sup> Julius Pour, *Benny: Tragedi Seorang Loyalis*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007, hlm. 244.

Penyederhanaan upacara sesuai perintah penghematan Panglima ABRI Jenderal TNI Benny Moerdani terlihat dalam peringatan hari ulang tahun ABRI ke 38 pada tahun 1983. Tidak ada *flypass* pesawat terbang dan demonstrasi terjun payung oleh ratusan anggota ABRI. Hidangan yang disajikan juga dipilih sangat sederhana, sepotong kue dan satu kotak air teh. Kesederhanaan ini bukan berarti berkurangnya penghormatan dan penghargaan terhadap ABRI, melainkan keprihatinan yang mendalam akan keselamatan kesinambungan pembangunan nasional yang sedang dihambat akibat resesi dunia.<sup>37</sup> Selain itu, penghematan juga dilakukan dalam peninjauan Panglima ABRI ke daerah –daerah dengan membawa rombongan kecil dan tanpa rombongan dari wartawan.

Panglima ABRI Jenderal TNI Benny Moerdani dalam kebijakannya untuk lebih menekankan peranan ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator memberi dampak positif. Dalam peranan sebagai dinamisator, ABRI bertugas mengamankan deregulasi dan menjaga agar setiap hambatan dan tantangan dapat diatasi agar tidak terjadi stagnasi. Sebagai contoh untuk sektor transportasi, Perwira Menengah berpangkat Kolonel ditugaskan sebagai Administrator di pelabuhan utama dan Bandara Soekarno-Hatta. Dalam peranan sebagai stabilisator, upaya utamanya adalah tindakan preventif yang tidak hanya pada aspek militer atau polisionil saja, namun juga aspek sosial-ekonomi dan sosial politik. Dalam aspek sosial-politik direalisasikan pada penyebarluasan konsepsi Ketahanan Nasional, penataran Kewaspadaan Nasional dan pelaksanaan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.<sup>38</sup>

Dalam proses penyempurnaan dan aktualisasi Doktrin Cadek 1966, Jenderal TNI Benny Moerdani mengajak seluruh generasi ABRI ikut berpartisipasi aktif untuk mengambil bagian dalam sarasehan tanggal 20 Februari 1988 guna menyepakati naskah final berjudul Doktrin Perjuangan TNI-ABRI Catur Dharma Eka Karma. Di dalamnya memuat kemampuan yang harus di bina dan ditampilkan ABRI meliputi kemampuan intelijen strategis, kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan, kemampuan sosial politik ABRI, kemampuan teritorial dan kemampuan dukungan. Dengan struktur enam kemampuan tersebut maka doktrin yang baru telah mampu mendukung pelaksanaan Dwifungsi ABRI secara tepat.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 238.

<sup>38</sup> Moerdani, *op.cit*, hlm. 21-22.

<sup>39</sup> Julius, *op.cit.*, hlm. 246.

Beban tugas ABRI dalam membina kerjasama luar negeri baik ASEAN, dan sekitarnya dimaksudkan untuk mendukung stabilitas dalam negeri sehingga diharapkan dapat mampu meningkatkan pendapatan negara.<sup>40</sup>

#### IV. Kesimpulan

Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah pemegang komando angkatan bersenjata (TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL dan Polri) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabatan Panglima ABRI diciptakan oleh Jenderal TNI Soemitro dalam konsepnya *Commanders Planning Guidance/Directive* yang dibuat untuk menata kembali organisasi ABRI pasca peristiwa 1965. Pada tanggal 23 Maret 1983 Presiden Soeharto mengangkat Letnan Jenderal TNI Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI berdasar Surat Keputusan Presiden No 47/M tertanggal 16 Maret 1983.

Pengangkatan Panglima ABRI Jenderal TNI Benny Moerdani sarat kepentingan politik. Berdasarkan perjalanan karirnya belum pernah memegang jabatan teritorial Komandan Resor Militer (Korem), Panglima Daerah Militer (Pangdam), bahkan KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) jenjang normal dalam struktur kepemimpinan ABRI. Jenderal TNI Benny Moerdani merupakan ahli intelijen lulusan Chandradimuka tahun 1950, belum pernah menempuh pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Ini mengubah tradisi dimana seorang intelijen menjadi pimpinan ABRI dan merupakan pengakuan tentang adanya dominasi intelijen dalam rencana politik Orde Baru.

Setelah dilantik menjadi Panglima ABRI, Jenderal TNI Benny Moerdani melakukan kajian terhadap berbagai masalah yang dihadapi ABRI. Terdapat tiga komponen utama postur ABRI yang harus dilakukan peninjauan, yaitu struktur kemampuan, tingkat kekuatan dan gelar kekuatan. Setelah itu, program penghematan dalam instansi ABRI dilakukan seperti penyederhanaan upacara dan mengurangi jumlah rombongan dalam setiap kunjungan Panglima ABRI ke daerah. Panglima ABRI juga semakin menekankan peranan ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator dalam tata kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi stagnasi dan melakukan tindakan preventif terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik. Guna meningkatkan kualitas individu prajurit, Panglima ABRI memberikan peningkatan pendidikan dan kesejahteraan. Beban tugas ABRI bukan saja hanya dalam membina stabilitas dalam negeri, akan tetapi juga wajib melakukan pembinaan kerjasama luar negeri guna menunjang stabilitas dalam negeri.

---

<sup>40</sup> Moerdani, *op.cit.* hlm. 26-27.

Tidak semua gagasan Panglima ABRI Jenderal TNI Benny Moerdani bisa dilaksanakan, gagasan membuat seragam militer yang sama seluruh angkatan dan tentang perwira tinggi berbintang empat aktif hanya ada satu yakni Panglima ABRI dan Kepala Staf Angkatan cukup dengan bintang tiga ternyata masih menemui kesulitan pada penerapannya. Setelah reorganisasi diterapkan, kini Panglima ABRI dapat membawahi langsung seluruh komando utama pada masing masing angkatan. Dengan melakukan program penghematan, ketergantungan ABRI terhadap anggaran negara menjadi semakin kecil bahkan mampu untuk membeli alutsista ABRI dan meningkatkan profesionalisme prajurit. Gagasan menempatkan perwira yang berpengalaman dalam bidang politik dilakukan agar F-ABRI di MPR semakin lantang sebagai pelaksanaan Dwifungsi ABRI secara tepat. Pembinaan kerja sama luar negeri juga dilakukan untuk menunjang stabilitas keamanan dalam negeri.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Achmad Wisnu Aji. (2010). *Kudeta Supersemar: Penyerahan atau Perampasan Kekuasaan?*. Yogyakarta: Garasi House of Book.
- [2] Daliman. (2012). *Metode Penulisan Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- [3] David Jenkins. (2010). *Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- [4] Hendro Subroto. (2009). *Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- [5] Helius Sjamsuddin. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- [6] \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Sosial Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- [7] Gde Widja, I. (1998). *Sejarah Lokal dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- [8] Julius Pour. (2007). *Benny: Tragedi Seorang Loyalis*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- [9] \_\_\_\_\_. (1993). *Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan*. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman.
- [10] Kivlan Zen. (2004). *Konflik dan Integrasi TNI-AD*. Jakarta: Institute for Policy Studies.

- [11] Kuntowijoyo. (2003). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- [12] Miriam Budiardjo. (2008) *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- [13] Moh. Mahfud M. D. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [14] Moerdani, L.B. (1991). *Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Pandangan dan Ucapan Jenderal TNI (Purn) L.B. Moerdani 1988-1991*. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Panglima Besar Sudirman.
- [15] Nugroho Notosusanto. (1978). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- [16] Ramadhan K.H. (1994). *Soemitro: dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkoptamtib*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- [17] Sartono Kartodirdjo. (1982). *Pemikiran dan Pengembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [18] Susanto Zuhdi (Ed.). *Indonesia dalam Arus Sejarah 8: Orde Baru dan Reformasi*. PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- [19] Tempo. (2014). *Rahasia-rahasia Ali Moertopo*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- [20] \_\_\_\_\_. (2015). *Benny Moerdani yang Belum Terungkap*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- [21] Tim. (2013). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY.
- [22] Suwarno, P. J. (1988-1998). "Hubungan Presiden dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia". Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- [23] Berita Nasional, 28 Februari 1988
- [24] Kompas, 18 Maret 1983
- [25] Kompas, 24 Maret 1983
- [26] Tempo, 20 Februari 1988
- [27] Tempo, 2 April 1983
- [28] Tempo, 8 April 1983
- [29] Tempo, 8 Oktober 1983

Yogyakarta, Oktober 2016

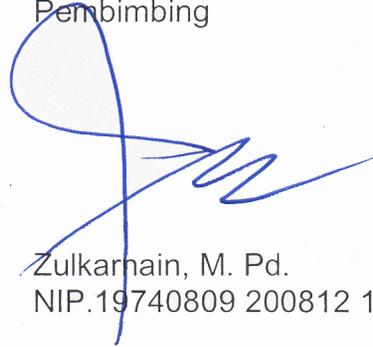
Menyetujui,

Reviewer



Dr. Aman, M.Pd.  
NIP. 19741015 200312 1 001

Pembimbing



Zulkarnain, M. Pd.  
NIP.19740809 200812 1 001